



# Kasus KONI, Bukti Penegakan Hukum di Kalbar Tumpul ke Atas

Baru Iswanto Ditahan, Petinggi KONI Saat Itu?

PONTIANAK. Penegakan hukum di negeri ini layaknya pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparat penegak hukum mulai polisi, jaksa dan hakim, sangat begitu garang ketika menangani dan menghukum pelaku kejahatan atau tindak pidana dari kaum bawah.

Garangnya para penegak hukum sudah dimulai sejak proses penyidikan di polisi. Sebut saja ketika ada orang miskin melakukan tindak pidana pencurian ringan yang motifnya sering kali karena keterdesakan, atau tindak pidana ringan lainnya, polisi langsung memproses hukum, bahkan kerap kali pelaku langsung ditahan.

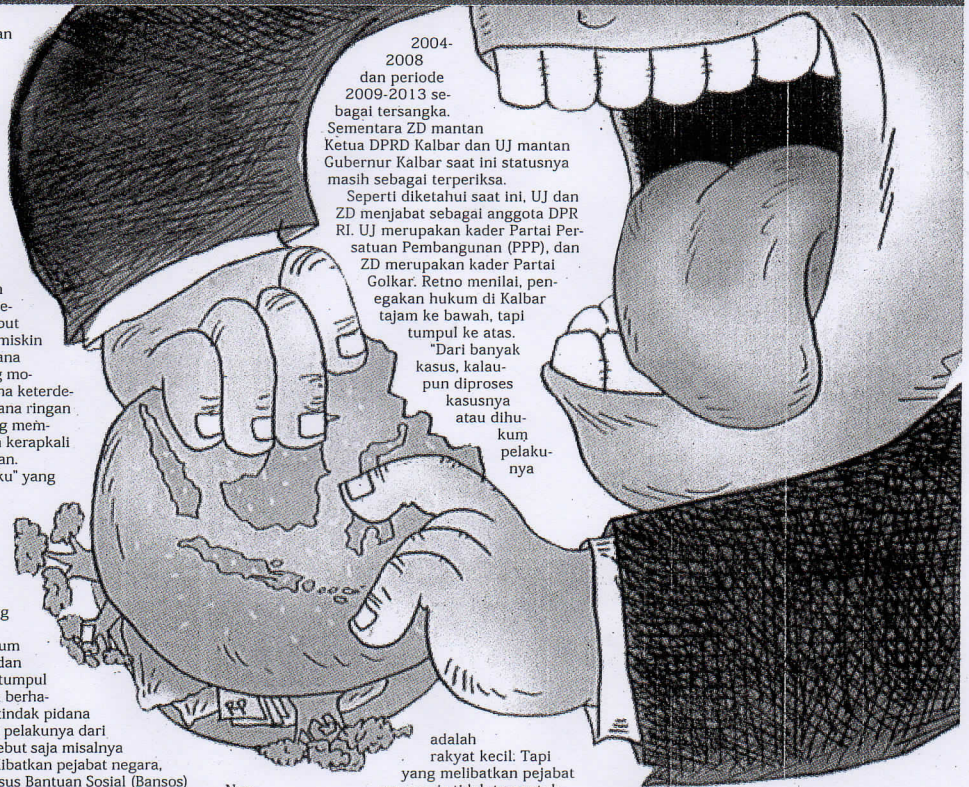
Alasan normatif "kaku" yang seringkali digunakan adalah, karena alasan objektif dan alasan subjektif. Dua alasan ini yang sering pula diterapkan secara berbeda ketika menangani pelaku yang berbeda kasta.

Aparat penegak hukum sangat begitu lembek dan pedang hukum terasa tumpul ketika menangani atau berhadapan dengan pelaku tindak pidana korupsi misalnya yang pelakunya dari golongan kasta atas. Sebut saja misalnya kasus yang diduga melibatkan pejabat negara, sebut saja misalnya kasus Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar 2006-2008.

Bertahun-tahun lamanya, hingga 2013 kasus Bansos KONI Kalbar yang merugikan Negara Rp 22,14 miliar belum juga tuntas. Aparat penegak hukum di Kalbar terkesan memimping kasus yang saat ini ditangani Polda Kalbar itu. Kejaksaan Tinggi Kalbar baru menahan Iswanto, tersangka kasus korupsi Bansos itu, Selasa (2/4).

Iswanto ditahan di Rumah Tahanan Klas IIA Pontianak. Penahanan ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Pontianak menyerahkan kasus itu kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar. "Kinerjanya para aparat penegak hukum di Kalbar semakin buruk terutama dalam komitmen pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi terutama yang melibatkan para pejabat tinggi tidaklah jelas tindak lanjut proses hukumnya," sesal H Retno Pramudya SH MH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar kepada Rakyat Kalbar via BBM, Sabtu (6/4).

Polisi hanya menyeret koruptor berinisial Isw, mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar periode



2004-2008 dan periode 2009-2013 sebagai tersangka. Sementara ZD mantan Ketua DPRD Kalbar dan UJ mantan Gubernur Kalbar saat ini statusnya masih sebagai terperiiksa. Seperti diketahui saat ini, UJ dan ZD menjabat sebagai anggota DPR RI. UJ merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan ZD merupakan kader Partai Golkar. Retno menilai, penegakan hukum di Kalbar tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. "Dari banyak kasus, kalau pun diproses kasusnya atau dihukum pelakunya

adalah rakyat kecil. Tapi yang melibatkan pejabat ara nyaris tidak tersentuh.

Neg- Contohnya kasus Bansos KONI Kalbar ini, yang melibatkan para pejabat tinggi Kalbar. Mereka tidak tersentuh dan seolah-olah kebal hukum, yang diproses justru hanya mantan wakil bendaharanya," kata Retno.

Jadi, sambung politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini, sangatlah tidak masuk akal dimana uang puluhan miliar raib tanpa diketahui para petinggi KONI saat itu. Hal inilah menunjukkan betapa buruknya kinerja aparat penegakkan hukum dalam menangani kasus tersebut, dan terkesan ada upaya melindungi para pejabat yang terlibat itu.

"Kasus bocornya anggaran Bansos merupakan hasil temuan audit BPK RI Kalbar 2006-2008 dan telah diserahkan kepada Polda Kalbar. Proses penyidikan dan penyalidikannya memakan waktu sekitar tiga tahun," tegas Retno.

Seperti diberitakan Senin (1/4), Kombes Pol Wildan Dani, Dir Reskrimsus Polda Kalbar mengungkapkan, barang bukti dan tersangka kasus

KONI sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Walaupun masa jabatan Isw masih hingga sekarang, namun dia sudah dinonaktifkan oleh KONI. Alasannya karena telah terbukti melakukan korupsi berdasarkan hasil audit BPK dan diterima berkasnya oleh Kejaksaan. Selain Isw, Polda Kalbar juga menyerahkan barang bukti serta berkas penyelidikan tahap II. Ini dinyatakan tahap II, lantaran berkas penyidikan Isw dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Polisi menjerat Isw dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 9 undang-undang nomor 31/1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Dugaan pelaku lainnya ZD dan UJ yang merupakan mantan pejabat di Kalbar, masih menunggu hasil audit BPK. Kasus mereka juga sedang didalami Polda Kalbar.

Reporter: Syamsul Arifin  
Editor: Julianus Ratno